



Tak Menolak Asalkan Ada Solusi

Soal Pemprov Akan Tertibkan Becak Motor

JOGJA - Pemprov DIJ berencana menertibkan operasional becak motor di kawasan Malioboro secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk menata kawasan wisata agar lebih tertib, aman, dan ramah lingkungan.

Sekprov DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, rencana penertiban tersebut bukan untuk menghilangkan mata pencaharian tukang becak, melainkan menata moda transportasi agar lebih aman dan ramah lingkungan.

"Tetapi menata, bisa secara bentuk moda maupun jumlah layanannya. Kami melarang, tapi ada solusinya yakni becak kayu bertenaga alternatif," ujarnya belum lama ini.

Made telah melakukan konsolidasi dengan paguyuban becak motor, bahkan sejak ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DIJ. Konsolidasi tersebut tentang penggantian becak motor ke becak kayu tenaga alternatif maupun becak listrik.

Namun prosesnya tidak mudah karena butuh waktu dan kesadaran bersama. Beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan unit becak motor pun diharapkan menjadi bagian untuk refleksi terkait perlunya penataan dan penertiban.

"Harapan besar kami semua ini bisa diikuti, bukan kami mematikan eko-



DITERTIBKAN: Becak motor saat membawa penumpang wisatawan manca negara berkeliling Kota Jogja. Pemprov DIJ berencana menertibkan becak motor untuk menata kawasan wisata.

nomi masyarakat tapi kami sudah memberikan opsi," bebernya.

Persoalan saat ini, beberapa pengemudi becak kayu tenaga alternatif yang kemarin sudah mendapatkan fasilitas masih sedikit ditemui beroperasi di Malioboro. Pemerintah ketika melakukan pelarangan juga menyiapkan solusi, bahkan sampai sekarang masih mengupayakan agar unit becak listrik maupun alternatif bisa diadakan.

"Kami sudah berusaha tahun 2020, mengupayakan becak tenaga alter-

natif dan becak listrik," tandasnya.

Hingga kini, Pemprov DIJ baru memiliki sekitar 90 unit becak listrik yang disiapkan. Upaya penambahan dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa pihak baik swasta atau komunitas yang peduli dengan isu lingkungan.

"Saya lagi *sounding* dengan beberapa pihak untuk seribu (unit)," paparnya.

Adapun skenario penataannya, semacam ada pembagian sisi layanan agar kawasan Malioboro tidak terlalu padat. Sebab, sebagai kawasan pedestrian, pejalan kaki dinilai tidak akan

nyaman apabila terlalu padat.

"Becak motor itu *kan* juga ilegal *kan*, datanya ada sekitar 2.000-an itu beberapa tahun lalu, tidak semuanya juga ber-KTP sini (Jogja)," jelasnya.

Sementara, Ketua Paguyuban Tukang Becak Prasajo Purwanto mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana penertiban itu. Meski demikian, pihaknya tidak menolak jika kebijakan tersebut dijalankan, asalkan disertai solusi yang jelas bagi mereka.

"Selama ini belum diinfo, penertibannya seperti apa dan teknisnya gimana dulu setidaknya," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (12/10).

Sebelumnya, ia mengakui memang pernah ada rencana penggantian unit becak motor menjadi kayu dan ditambah dengan energi alternatif atau listrik. Bahkan, beberapa tukang becak juga sudah memakainya. Mereka juga masih mempertanyakan keefektifan waktu, lokasi *charger* dan sebagainya.

Total anggota aktif Paguyuban Tukang Becak Prasajo sekitar 97 orang yang mencari penghidupan menjadi sopir becak motor. Maka dari itu, ia berharap kebijakan pemprov harus mempertimbangkan nasib para tukang becak motor.

"Sebagai warga negara tentunya kami harus patuh pada aturan pemerintah. Tapi di sisi lain pemerintah juga jangan semena-mena sama warganya, harus ada solusi yang terbaik," harapnya. (**oso/wia/zl**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 27 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005